

---

## Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah Ibtidaiyah

Muhammad Nasrullah<sup>1)</sup>, Amril. M<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,  
Indonesia

\* Email : [nasrullah.nas0991@gmail.com](mailto:nasrullah.nas0991@gmail.com)  
[amril@uin-suska.ac.id](mailto:amril@uin-suska.ac.id)

---

### Abstrak

*Kebijakan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan instrumen strategis yang dirancang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam pendidikan dasar. Kebijakan ini meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan pembinaan karakter siswa secara holistik. Melalui implementasi kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan program moderasi beragama, MI diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga membentuk generasi yang religius, toleran, dan berakhlak mulia. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan fasilitas, rendahnya kapasitas guru, serta kurangnya dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan karakter siswa, terutama di MI yang mampu menerapkannya secara optimal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, kebijakan pendidikan Islam di MI berpotensi menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muslim yang berkualitas.*

**Kata Kunci :** Kebijakan, Pendidikan, Islam

### Abstract

*The Islamic education policy in Madrasah Ibtidaiyah is a strategic instrument designed by the government, especially the Ministry of Religious Affairs, to strengthen Islamic values in basic education. This policy includes curriculum development, improving the competence of educators, and holistic character development of students. Through the implementation of policies such as the Merdeka Curriculum and religious moderation programs, MI is expected to be able to become an educational institution that is not only academically superior but also forms a generation that is religious, tolerant, and has noble morals. However, in its implementation, the policy faces a number of challenges, such as inequality of facilities, low teacher capacity, and lack of budget support and community participation. Nevertheless, this policy has had a positive impact on student learning and character, especially in MI that is able to implement it optimally. With strong synergy between the government, educators, and the community, the Islamic education policy in MI has the potential to become an important foundation in producing a quality Muslim generation.*

**Keywords:** Policy, Education, Islam

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik sejak dini. Dalam konteks Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai lembaga pendidikan dasar Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan Islam di MI dirancang untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. (Muhaimin 2021)

Kebijakan pendidikan Islam di MI meliputi berbagai aspek, seperti kurikulum, pengembangan tenaga pendidik, pembinaan karakter, serta integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan keislaman. Pemerintah melalui Kementerian Agama berperan aktif dalam merumuskan kebijakan tersebut, seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan yang

menekankan pentingnya literasi religius, numerasi, serta keterampilan abad 21. ( Fadhilah, Siti 2023).

Perubahan regulasi dan dinamika sosial mendorong pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam, khususnya di tingkat MI. Dalam beberapa dekade terakhir, kurikulum MI mengalami berbagai penyempurnaan, seperti penerapan Kurikulum Merdeka yang adaptif dan kontekstual. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid dan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di MI masih cukup kompleks. Di antaranya adalah disparitas mutu antara madrasah negeri dan swasta, keterbatasan sarana-prasarana, serta kualitas guru yang belum merata. Permasalahan ini memerlukan solusi kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Kajian terhadap kebijakan pendidikan Islam di MI menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan mampu menjawab kebutuhan peserta didik secara komprehensif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih baik di masa mendatang (Rahman, Andi 2023)

Kebijakan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan hasil dari proses perumusan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan dasar secara sistematis dan terstruktur. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan kurikulum yang menggabungkan mata pelajaran umum dengan pelajaran keislaman, seperti Akidah Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an Hadis, dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). (Muhaimin 2021) Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menerapkan Kurikulum Merdeka di madrasah, termasuk MI. Kurikulum ini memberi ruang bagi madrasah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta mendorong penguatan karakter Islami melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Implementasi kurikulum ini difokuskan pada pembelajaran yang berpihak pada siswa, melalui project-based learning yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan sosial.

Perumusan kebijakan pendidikan Islam di MI sejatinya merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai keislaman. Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) menyusun kebijakan dengan pendekatan top-down dan partisipatif, melibatkan pakar pendidikan, guru madrasah, serta akademisi perguruan tinggi keislaman.

Kebijakan ini juga mengacu pada visi besar Moderasi Beragama yang diintegrasikan dalam kurikulum madrasah. Visi ini menekankan pentingnya menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama sejak usia dini, termasuk di MI. Implementasinya mencakup revisi kurikulum serta pengembangan modul ajar dan buku teks yang sejalan dengan prinsip moderasi tersebut. Selain itu, kebijakan penerapan Pendidikan Agama Islam di MI mengadopsi prinsip fleksibilitas dan diferensiasi. Artinya, madrasah diberikan ruang untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kondisi peserta didik. (Asy'ari, M 2024). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak bersifat seragam, tetapi adaptif terhadap lingkungan. Pemerintah juga menggagas program Madrasah Reform, yang bertujuan meningkatkan tata kelola madrasah dan memperkuat otonomi manajerial. Dalam konteks MI, program ini memberi ruang bagi kepala madrasah untuk berinovasi dalam pengelolaan kurikulum, SDM, dan kemitraan sekolah. (Mahfud, Choirul 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Kebijakan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan instrumen strategis yang dirancang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memperkuat nilai-nilai

keislaman dalam pendidikan dasar. Kebijakan ini meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan pembinaan karakter siswa secara holistik. Melalui implementasi kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan program moderasi beragama, MI diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga membentuk generasi yang religius, toleran, dan berakhlak mulia. Secara afektif, kebijakan ini mendorong tumbuhnya kesadaran beragama yang moderat sejak dini. Peserta didik diajak memahami Islam secara damai, toleran, dan menghargai keberagaman. Dampak ini sangat penting di tengah tantangan ideologi ekstrem yang menasar generasi muda. (Rahmawati 2023)

Dari sisi kognitif, data menunjukkan bahwa siswa MI yang berada di bawah kebijakan kurikulum yang terintegrasi memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang meningkat, karena pembelajaran agama tidak lagi diajarkan secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan logika, bahasa, dan nilai sosial. (Malik, R 2024). Ini membuktikan bahwa kebijakan yang baik memiliki potensi mengangkat kualitas akademik secara menyeluruh. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa madrasah yang berhasil mengadopsi pendekatan *student-centered learning* mencatat peningkatan motivasi belajar siswa, pengurangan ketidakhadiran, dan peningkatan keaktifan dalam kegiatan madrasah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun kebijakan pendidikan Islam di MI telah dirumuskan dengan baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan fasilitas dan infrastruktur antar madrasah, terutama antara MI negeri dan swasta. (Rahman, Andi 2023) Banyak MI swasta yang berada di daerah terpencil tidak memiliki akses terhadap teknologi pembelajaran, perpustakaan, atau ruang kelas yang layak. Kualitas guru juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Tidak semua guru MI memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis nilai Islam dengan pendekatan pedagogis yang mutakhir. (Hasanah, Umi 2023)

Selain itu, keterbatasan anggaran pendidikan menjadi faktor penghambat lainnya. Banyak MI yang bergantung pada bantuan operasional pemerintah, yang seringkali tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pengembangan kurikulum, pelatihan guru, maupun peningkatan fasilitas. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala juga menyebabkan lemahnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan besar lainnya adalah perbedaan pemahaman terhadap kebijakan di tingkat pelaksana. Banyak guru dan kepala madrasah belum memahami sepenuhnya tujuan dan substansi kebijakan terbaru, sehingga terjadi kesenjangan antara kebijakan dan praktis lapangan. Hal ini diperburuk dengan kurangnya forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan pendidikan Islam secara reguler. (Nurdin, M 2024)

Masalah lain yang signifikan adalah ketidakmerataan kualitas pelatihan guru. Program peningkatan kompetensi sering kali hanya menjangkau guru di wilayah perkotaan, sementara guru di daerah 3T jarang mendapat akses informasi atau pelatihan yang sesuai dengan perkembangan kebijakan terbaru. Akibatnya, banyak guru yang tetap menggunakan metode konvensional dalam pengajaran.

Teknologi pembelajaran yang semestinya menjadi pendorong implementasi kebijakan justru belum bisa dimanfaatkan maksimal. Hambatan seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat digital, dan minimnya literasi digital guru menjadi faktor penghambat utama integrasi teknologi dalam pembelajaran MI. Selain faktor internal, tantangan eksternal seperti kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu diperhatikan. Kebijakan pusat seringkali tidak selaras dengan kondisi lokal, sementara keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih minim. (Fitria, S, 2023). Dalam hal capaian akademik, MI yang berhasil menerapkan kebijakan secara optimal menunjukkan peningkatan

hasil belajar, baik dalam aspek kognitif maupun afektif. Peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran umum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku mereka sehari-hari.

Namun, dampak kebijakan ini tidak merata di seluruh MI. Sekolah yang memiliki sumber daya memadai dan guru yang kompeten cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan. Sebaliknya, MI yang kekurangan fasilitas dan belum siap secara kelembagaan menunjukkan hasil yang kurang optimal. (Yusuf, Ahmad 2022)

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam di MI sangat penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa madrasah yang melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara rutin mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pusat, pelaksana madrasah, serta dukungan masyarakat perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan Islam dapat memberi dampak yang maksimal. (Zuhdi 2022.) Kebijakan pendidikan Islam secara umum telah mendorong penguatan karakter siswa. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama mulai tampak dalam aktivitas harian siswa MI, terutama jika diterapkan dengan pendekatan tematik terpadu dan berbasis proyek. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menerapkan Kurikulum Merdeka di madrasah, termasuk MI. Kurikulum ini memberi ruang bagi madrasah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta mendorong penguatan karakter Islami melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Implementasi kurikulum ini difokuskan pada pembelajaran yang berpihak pada siswa, melalui *project-based learning* yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan sosial. Penerapan kebijakan tersebut juga mencakup peningkatan mutu tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai (latif Abdu 2022).

Secara afektif, kebijakan ini mendorong tumbuhnya kesadaran beragama yang moderat sejak dini. Peserta didik diajak memahami Islam secara damai, toleran, dan menghargai keberagaman. Dampak ini sangat penting di tengah tantangan ideologi ekstrem yang menyasar generasi muda. Dari sisi kognitif, data menunjukkan bahwa siswa MI yang berada di bawah kebijakan kurikulum yang terintegrasi memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang meningkat, karena pembelajaran agama tidak lagi diajarkan secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan logika, bahasa, dan nilai sosial. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang baik memiliki potensi mengangkat kualitas akademik secara menyeluruh. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa madrasah yang berhasil mengadopsi pendekatan *student-centered learning* mencatat peningkatan motivasi belajar siswa, pengurangan ketidakhadiran, dan peningkatan keaktifan dalam kegiatan madrasah (Rahmawati, T. 2023).

## KESIMPULAN

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan fasilitas, rendahnya kapasitas guru, serta kurangnya dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan karakter siswa, terutama di MI yang mampu menerapkannya secara optimal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, kebijakan pendidikan Islam di MI berpotensi menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muslim yang berkualitas.

## REFERENSI

- Ahmad, N. (2023). Kebijakan Diferensiasi Kurikulum di Madrasah. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran Islam*, 6(2), 112–124.
- Anwar, M. (2023). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(2), 77–88.

- Aziz, A. (2023). Pendidikan Islam dan Pencegahan Radikalisme Sejak Dini. *Tarbiyah Islamiyah*, 8(2), 101–115.
- Direktorat KSKK Madrasah. (2024). *Madrasah Reform Project Report*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fitria, S. (2023). Pelatihan Guru di Daerah Terpencil: Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah di Kalimantan. *Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 99–110.
- Kamil, M. (2024). Implementasi Kurikulum Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin. *Jurnal Pendidikan Islam Integratif*, 5(1), 25–40.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Modul Moderasi Beragama untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mahfud, C. (2022). *Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Malik, R. (2024). Dampak Student-Centered Learning terhadap Keaktifan dan Prestasi Belajar di MI. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 11(1), 45–58.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Menyelesaikan Problematika Pendidikan dalam Perspektif Global*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, M. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di MI. *Jurnal Pendidikan Islam Dasar*, 8(1), 33–45.
- Rahmawati, T. (2023). Integrasi Nilai Islam dalam Pembelajaran Tematik di MI. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(1), 88–99.
- Sari, L. (2023). Kesiapan Digitalisasi Pembelajaran di Madrasah. *Teknodik: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 28(1), 54–66.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Kini dan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zuhairini, et al. (2003). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.